KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Siap Kawal - Gunakan APBN untuk Kesejahteraan Rakyat
Tanggal : Rabu, 17 Januari 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

DPR Siap Kawal

Gunakan APBN Untuk Kesejahteraan Rakyat

KETUA DPR Puan Maharani mengingatkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, penurunan kemiskinan ekstrem, penanganan *stunting* dan mengatasi kesenjangan.

Puan mengatakan, sejatinya APBN Tahun 2024 didesain untuk akselerasi, transformasi ekonomi dan berperan sebagai *shock absorber*. APBN juga harus mampu menuntaskan agenda pembangunan yang fokus pada *human capital*, *physical capital*, *natural capital*, dan *institutional reform*.

"APBN juga menjadi instrumen untuk kesejahteraan rakyat dalam hal penurunan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting dan mengatasi kesenjangan," kata Puan saat membuka Masa Persidangan III DPR Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Karena itu, Puan memastikan DPR akan terus mengawasi kebijakan fiskal tahun 2024 agar dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menyejahterakan rakyat. Pemerintah harus tertib dalam menjalankan APBN 2024 dan memastikan penggunaan anggaran secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran.

"Pemerintah harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan tidak membuka celah penyalahgunaan anggaran, merealisasikan anggaran secepatnya serta menyiapkan antisipasi ketidakpastian," katanya.

Puan mengatakan, penyesuaian program dan alokasi anggaran dalam APBN 2024 yang sedang berjalan harus sesuai mekanisme syarat dan ketentuan Undang-Undang APBN 2024.

APBN merupakan uang rakyat, sehingga penggunaannya harus memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"DPR melalui alat kelengkapan dewan dalam persidangan III ini akan memastikan bahwa regulasi, kinerja kelembagaan, kinera program, serta pengelolaan anggaran berjalan efektif, tepat sasaran dan akuntabel," katanya.

Puan juga memastikan fungsi pengawasan DPR akan diarahkan pada berbagai isu permasalahan dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD), serta hal-hal yang menjadi perhatian luas dari rakyat.

"DPR melalui AKD terkait akan memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang demokratis dan dapat menjamin hak rakyat menjalankan kedaulatannya," tegas Puan. ■ KAL